



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
023.18.1300.677593.000 KD

2021



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
023.18.1300.677593.000 KD

LK

TAHUN ANGGARAN
2021



LAPORAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Negeri Ketapang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ketapang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Negeri Ketapang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ketapang, 21 Januari 2022
Direktur,



Endang Kusmana
NIP 196810302001121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangge Sentap - Dalung, Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : www.politap.ac.id email: humas@politap.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ketapang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ketapang, 21 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Endang Kusmana
NIP 196810302001121002

	Halaman
Kata Pengantar _____	i
Daftar Isi _____	ii
Pernyataan Tanggung Jawab _____	v
I. Ringkasan Laporan Keuangan _____	1
II. Laporan Realisasi Anggaran _____	3
III. Neraca _____	4
IV. Laporan Operasional _____	5
V. Laporan Perubahan Ekuitas _____	6
VI. Catatan atas Laporan Keuangan _____	7
A. Penjelasan Umum _____	7
A.1. Dasar Hukum _____	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknik Politeknik Negeri Ketapang _____	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan _____	10
A.4. Basis Akuntansi _____	10
A.5. Dasar Pengukuran _____	10
A.6. Kebijakan Akuntansi _____	11
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran _____	21
B.1. Pendapatan _____	21
B.2. Belanja _____	21
B.3. Belanja Pegawai _____	23
B.4. Belanja Barang _____	24
B.5. Belanja Modal _____	25
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca _____	27
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran _____	27
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan _____	27
C.3. Kas lainnya dan setara kas _____	27
C.4. Pendapatan Yang Masih Harus diterima _____	27
C.5. Piutang Bukan Pajak _____	28
C.6. Penyisihan Piutang _____	28
C.7. Persediaan _____	29

C.8. Tanah	29
C.9 Peralatan Dan Mesin	30
C.10. Gedung dan Bangunan	31
C.11. Jalan,Irigasi dan Jaringan	32
C.12. Aset Tetap Lainnya	33
C.13. KDP	33
C.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34
C.15. Aset Tak Berwujud	35
C.16. Utang Kepada Pihak Ketiga	35
C.17. Pendapatan diterima dimuka	36
C.18. Uang Muka dari KPPN	36
C.19. Utang Jangka Pendek Lainnya	36
C.20. Ekuitas	36
C.21. Catatan Penting Lainnya Neraca	37
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	38
D.2. Beban Pegawai	38
D.3. Beban Persediaan	39
D.4. Beban Barang Jasa	40
D.5. Beban Pemeliharaan	41
D.6. Beban Perjalanan Dinas	41
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
D.8. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	42
D.9. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	42
D.10. Beban dari kegiatan non operasional lainnya	43
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	44
E.2. Surplus (Defisit) LO	44
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi	44
E.4. Transaksi Antar Entitas	45
E.5. Kenaikan / Penurunan Ekuitas	45
E.6. Ekuitas Akhir	45
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	
F.1. Politeknik Negeri Ketapang	46

F.2. Pengelola Keuangan _____	46
F.3. Pengungkapan Lain-lain _____	47
F.4. Jurnal Tidak Lazim _____	47

Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ketapang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp.5.187.123.117. atau sudah mencapai 94 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.5.545.040.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.24.712.714.964. atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.24.931.835.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.161.003.278.052. yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.70.957.430. Aset Tetap (neto) sebesar Rp.160.932.320.622. Piutang bukan pajak (neto) sebesar Rp.3.980.000. dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.960.136.456. Dan Rp.160.043.141.596.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp.4.713.123.116. sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.28.043.666.312. sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(23.330.543.196). Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp.0. dan beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp.0. sehingga tidak terdapat surplus maupun defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp.0. Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp.0. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(23.330.543.196).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.125.535.814.372. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(23.330.543.196) koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp.(43.756.180)., koreksi atas reklasifikasi sebesar Rp.(540.187) dan koreksi lain-lain sebesar Rp.146.500. ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.57.882.020.287. kemudian kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp(34.507.327.224) sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.160.043.141.596.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.545.040.000	5.187.123.117	93,55	4.900.408.231
JUMLAH PENDAPATAN		5.545.040.000	5.187.123.117	93,55	4.900.408.231
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	8.262.066.000	8.136.999.988	98,49	2.641.126.706
Belanja Barang	B.4	14.903.013.000	14.832.600.164	99,53	14.495.042.690
Belanja Modal	B.5	1.766.756.000	1.743.114.812	98,66	1.199.656.000
Jumlah Belanja Operasi		24.931.835.000	24.712.714.964	99,12	18.335.825.396
Pinjaman Dan Hibah					
Belanja Barang	B.6	-	-	-	-
Belanja Modal	B.7	-	-	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		24.931.835.000	24.712.714.964	99,12	18.335.825.396

II. NERACA

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.636.505	-
Pendapatan Yang Masih Harus diterima	C.4	34.500.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	4.000.000	29.300.000
Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.6	(20.000)	(146.500)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.7	3.980.000	29.153.500
Persediaan	C.8	30.840.925	52.413.042
JUMLAH ASET LANCAR		70.957.430	81.566.542
ASET TETAP			
Tanah	C.9	36.494.874.000	36.494.874.000
Peralatan dan Mesin	C.10	64.720.567.111	62.563.829.410
Gedung dan Bangunan	C.11	109.225.288.211	24.454.837.950
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	2.792.426.790	2.792.426.790
Aset Tetap Lainnya	C.13	2.536.763.860	2.536.763.860
Konstruksi dalam pengerjaan	C.14	6.407.520.000	52.953.541.821
Akumulasi Penyusutan	C.15	(61.245.119.350)	(55.811.771.315)
JUMLAH ASET TETAP		160.932.320.622	125.984.502.516
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.16	1.418.009.174	1.418.009.174
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(1.418.009.174)	(1.418.009.174)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		161.003.278.052	125.984.502.516
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada pihak ketiga	C.18	66.819.789	120.138.020
Pedapatan Diterima dimuka	C.19	893.316.667	410.116.666
UangMuka dari KPPN	C.20	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.21	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		960.136.456	530.254.686
JUMLAH KEWAJIBAN		960.136.456	530.254.686
EKUITAS			
Ekuitas	C.22	160.043.141.596	125.535.814.372
JUMLAH EKUITAS		160.043.141.596	125.535.814.372
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		161.003.278.052	126.066.069.058

III. LAPORAN OPERASIONAL

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.713.123.116	4.517.291.565
JUMLAH PENDAPATAN		4.713.123.116	4.517.291.565
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.064.715.828	2.713.410.866
Beban Persediaan	D.3	626.691.420	846.971.471
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.434.459.881	11.917.999.632
Beban Pemeliharaan	D.5	2.055.299.013	1.571.776.958
Beban Perjalanan Dinas	D.6	556.152.002	333.122.998
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	5.306.328.168	2.213.863.824
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	-	146.500
JUMLAH BEBAN		28.043.646.312	19.597.292.249
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(23.330.523.196)	(15.080.000.684)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	-	32.362.199
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	13.753.117
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	18.609.082
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(23.330.523.196)	(15.061.391.602)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.10	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(23.330.523.196)	(15.061.391.602)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	125.535.814.372	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(23.330.543.196)	(15.061.391.602)
PENYESUAIAN NILAI ASET LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4	(540.187)	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.6	(43.756.180)	-
KOREKSI LAIN-LAIN		146.500	(29.030.986)
Jumlah Lain-Lain		(44.149.867)	(29.030.986)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		57.882.020.287	140.626.236.960
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	34.507.327.224	125.535.814.372
EKUITAS AKHIR		160.043.141.596	125.535.814.372

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2019 – 2024;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja 2019-2024;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.05/2017 tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Profil Satker

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Negeri Ketapang

Politeknik Ketapang (POLITAP) didirikan oleh Yayasan Pangeran Iranata Ketapang bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui

Kesepakatan Bersama Nomor: 03/YPI-KTP/B/02/06 dan 425.1/Ekbangsos-C tanggal 12 Februari 2006 yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 66/D/O/2008 tanggal 8 April 2008. Pada tanggal 26 Pebruari 2014 seiring terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, organisasi dan tata kerja POLiteknik Negeri Ketapang, maka status Kelembagaan Politeknik Ketapang menjadi Politeknik Negeri Ketapang (POLITAP) berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri dan menjadi Satuan Kerja.

Visi Politeknik Negeri Ketapang sebagaimana diatur pada pasal 23 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang adalah *Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional*. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi dan tujuan sebagaimana diatur pada pasal 24 dan 25 Peraturan Menteri tersebut yaitu :

1. Misi Politap adalah :
 - a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
 - b. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik; dan
 - e. membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan
2. Tujuan Politap adalah
 - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;

- b. menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- c. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional

Untuk mengimplementasikan visi, misi dan tujuan tersebut, Politeknik Negeri Ketapang telah menyusun Rencana Strategis Politap 2020-2024 dan merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu melalui penentuan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan relevansi, kualitas dan kapasitas layanan akademik
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Kemahasiswaan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Institusi
4. Meningkatkan Relevansi, Kualitas dan Kuantitas SDM
5. Memperkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja.

Salah satu implementasi untuk mewujudkan sasaran kelima *memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja* adalah penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, akurat dan transparan. Politeknik Negeri Ketapang merupakan satuan kerja vertikal dibawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan akuntansi pemerintah dengan penyajian yang akuntabel, akurat dan transparan guna mendukung penyajian Laporan Keuangan Kementerian sebagai satu kesatuan entitas pelaporan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Negeri Ketapang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Politeknik Negeri Ketapang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Negeri Ketapang dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Vokasi yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Negeri Ketapang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan -
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pendidikan diakui setelah pelaksanaan pendidikan selesai dilaksanakan pada periode yang bersangkutan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka nilai tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada Pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp.5.187.123.117

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.5.187.123.117. atau mencapai 94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.5.545.040.000. Pendapatan Politeknik Negeri Ketapang terdiri dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan Pendapatan anggaran lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Biaya Pendidikan	5.452.840.000	5.089.003.000	93,33
Pendapatan Ujian/Seleksi masuk pendid	92.200.000	92.200.000	
Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	5.920.117	-
Jumlah	5.545.040.000	5.187.123.117	93,55

Realisasi Pendapatan Pendidikan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.5.187.123.117. dan Rp.4.900.408.231. Terdapat Kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah kelas untuk pegawai Pemda Ketapang serta tahun ini jumlah peminat cukup tinggi. sementara pendapatan anggaran lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari SPM kekurangan belanja pegawai, dimana pegawai yang bersangkutan mendapatkan rapelan tunjangan fungsional sehingga berimplikasi pada pengembalian tunjangan umum pada SPM kekurangan tersebut sehingga membentuk akun pendapatan anggaran lain-lain.

Realisasi Belanja
Negara Rp
Rp.24.712.714.964.

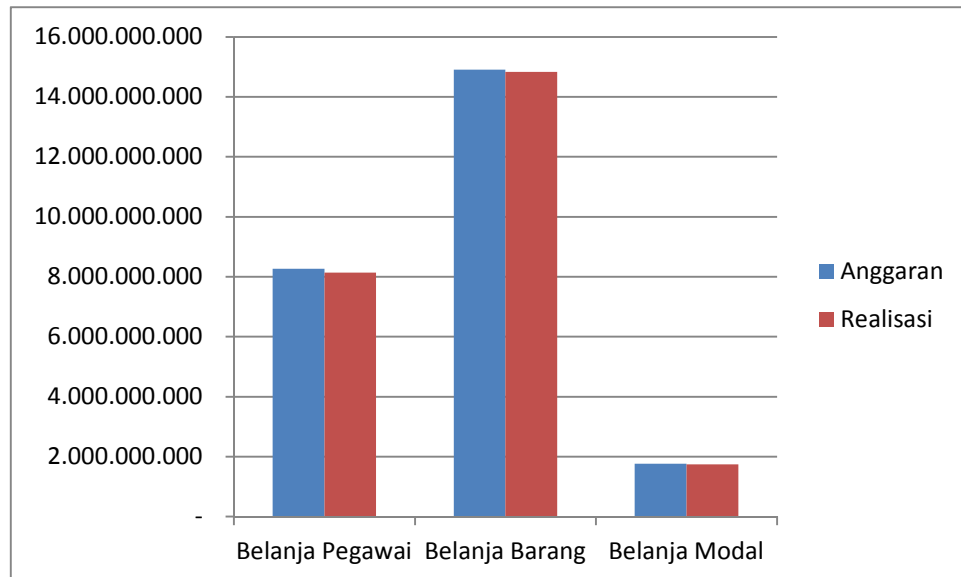
B.2. Belanja

Realisasi belanja Politeknik Negeri Ketapang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.24.712.714.964. atau 99 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.24.931.835.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	8.262.066.000	8.136.999.988
Belanja Barang	14.903.013.000	14.832.600.164
Belanja Modal	1.766.756.000	1.743.114.812
Bantuan Sosial	0	0
Pinjaman dan Hibah		
Belanja Barang	0	0
Belanja Modal	0	0
Total Belanja Kotor	24.931.835.000	24.712.714.964

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp.8.136.999.988. dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.641.126.706. terdapat lonjakan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada 01 Januari 2021 dilakukan pelantikan dan penyerahan SK PNS untuk 30 orang pegawai, yang secara langsung mengakibatkan kenaikan pada belanja pegawai yang semula hanya menerima gaji pokok 80 persen menjadi 100 persen per Januari 2021. Kemudian ditambah lagi dengan terbitnya SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bulan juni untuk 55 orang pegawai, dengan tmt dimulai dari bulan february 2021 namun baru bisa dibayarkan rapelan gaji dan tukinnya pada bulan nopember mengingat revisi Dipa untuk penambahan baru selesai pada bulan tersebut. Sementara itu Realisasi Belanja barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp.14.832.600.164. dan 31 Desember 2020 Rp.14.495.042.690. kenaikan pada belanja barang pada tahun ini ialah dikarenakan kegiatan sudah terencana dengan menyesuaikan dengan kondisi wabah Covid-19 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami hambatan dikarenakan banyak kegiatan belum siap dengan kondisi wabah Covid-19, kemudian ditambah lagi pada saat itu bulan Januari-Maret 2020 kita mengalami pagu blokir untuk belanja barang karena peralihan dari Ristek ke Dikbud. untuk belanja modal sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.743.114.812. dan 31 Desember 2020 juga sebesar Rp.1.199.656.000. adapun besaran belanja modal tahun ini dilaksanakan dari dipa revisi ke 2 yang

terbit tanggal 13 Oktober 2021 penambahan Program Sarjana Terapan Berbasis industri dengan pagu belanja modal Rp.1.566.981.000. berupa pengembangan SDM, Lokakarya, Workshop dan Pengadaan alat lab dan Pendukung pembelajaran 2 Prodi yakni Agro Industri dan Teknik Informatika.

*Belanja Pegawai
Rp.8.136.999.988.*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Politeknik Negeri Ketapang per 31 Desember 2021 sebesar Rp.8.136.999.988. dan 31 Desember 2020 adalah Rp.2.641.126.706. terdapat kenaikan pada belanja pegawai, hal ini tidak terlepas karena adanya perubahan status pegawai yang awalnya CPNS menjadi PNS per tanggal 01 Januari 2021 sehingga hal ini berpengaruh pada belanja pegawai yang meningkat karena yang semula hanya menerima gaji 80 persen menjadi 100 persen untuk 30 orang pegawai. Kemudian pada tahun ini ada 7 orang yang telah lulus sertifikasi dosen sehingga mendapatkan tunjangan profesi dosen yang menggunakan akun belanja pegawai. Pada tahun ini ada beban belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja tahun 2020 yang dibayarkan/dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2021 dikarenakan tidak mencukupi pada periode sebelumnya. Hal ini tidak terlepas pada tanggal 16 Nopember 2020 terbit surat persetujuan Ijin Prinsip Penyamaan Besaran Tunjangan kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di tandatangani langsung oleh menteri keuangan Ibu Sri Mulyani dengan nomor: S-1055/MK.02/2020 dan kekurangan tersebut dimulai dari TMT 01 Januari 2020. pada 01 Januari 2021 dilakukan pelantikan dan penyerahan SK PNS untuk 30 orang pegawai, yang secara langsung mengakibatkan kenaikan pada belanja pegawai yang semula hanya menerima gaji pokok 80 persen menjadi 100 persen per Januari 2021. Kemudian ditambah lagi dengan terbitnya SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bulan juni untuk 55 orang pegawai, dengan tmt dimulai dari bulan february 2021 namun baru bisa dibayarkan rapelan gaji dan tukinnya pada bulan nopember mengingat revisi DIPA untuk penambahan baru selesai pada bulan tersebut Sehingga mengakibatkan lonjakan presentase serapan dan tidak mencukupi untuk menggunakan pagu belanja pegawai pada saat itu. Adapun rincian belanja pegawai disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2021	REALISASI 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.413.245.400	1.114.290.320	-
Belanja pembulatan Gaji PNS	26.105	22.350	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	84.334.560	60.337.804	-
Belanja Tunjangan Anak PNS	19.966.354	13.887.106	
Belanja Tunjangan Struktural PNS	0	40.225.000	
Belanja Tunjangan Beras PNS	84.079.620	66.336.720	
Belanja Tunjangan Umum PNS	56.095.000	85.120.000	
Beban Tunjangan Profesi Dosen	745.938.630	410.414.400	
Beban Uang Makan PNS	319.548.000	350.096.122	
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	604.023.782	451.454.084	
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	151.180.000	48.325.000	
Belanja Tunjangan PPh PNS	1.883.102	617.800	
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.053.853.100		
Belanja pembulatan Gaji PPPK	15.363		
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	134.519.750		
Belanja Tunjangan Anak PPPK	47.497.830		
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	319.995.000		
Belanja Tunjangan Beras PPPK	145.202.100		
Belanja Uang Makan PPPK	413.522.000		
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PPPK	1.542.074.292		
Jumlah Belanja Kotor	8.136.999.988	2.641.126.706	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	8.136.999.988	2.641.126.706	208,09

Belanja Barang

Rp.14.832.600.164.

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang Politeknik Negeri Ketapang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.14.832.600.164.dan 31 Desember 2020 adalah Rp.14.495.042.690 terdapat kenaikan dari periode sebelumnya. Hal ini disebabkan pertama pada semester I 2020 Realisasi belanja barang di Politeknik Negeri Ketapang pada awal-awal triwulan pertama 2020 sangat rendah mengingat dari bulan januari – maret pertengahan terjadi Self Blocking / pagu blokir untuk dua jenis sumber pendanaan yakni dari BOPTN dan PNPB hanya dana (RM) untuk belanja gaji pegawai dan layanan perkantoran yang tidak di blokir kala itu. Hal ini tidak terlepas dari proses peralihan / perubahan nomenklatur dari BA 042 ke BA 023. Kedua karena kegiatan pada TA 2021 sudah terencana dengan menyesuaikan dengan kondisi wabah Covid-19 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami hambatan dikarenakan banyak kegiatan yang belum siap dengan kondisi wabah Covid-19. Pada tahun ini terdapat pemulihan pagu dengan kode MAK:4466:QEI:521115 Rp.1.540.560.845, MAK:4261:EAA:511153 Rp.10.106.670,

MAK:4467:SBA:521219 Rp.250.074, dan MAK:4466:QEI:523111 Rp.212.526.759. pemulihan pagu tersebut tidak terlepas dari terbitnya SK PPPK untuk 55 orang pegawai yang terlambat ditambah lagi dengan revisi anggaran yang lama turun dari pusat, beserta menunggu juknis terkait pembayarannya sehingga selama menunggu proses tersebut pegawai yang bersangkutan masih menerima gaji sebagaimana statusnya sebagai PPNPN. Setelah menerima rapelan gaji dan tunjangan kinerja dari akun belanja pegawai, barulah apa yang diterima pegawai yang bersangkutan dari akun 52 dikembalikan ke kas negara dan kemudian di pulihkan menggunakan SSPB.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	5.752.768.751	6.998.106.339	-
Belanja Barang Non Operasional	5.104.512.708	3.639.509.828	-
Belanja Jasa	569.682.798	314.344.404	-
Belanja Pemeliharaan	2.140.800.267	2.286.877.663	-
Belanja barang persediaan	708.683.638	965.024.958	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	556.152.002	333.122.998	-
Jumlah Belanja Kotor	14.832.600.164	14.536.986.190	-
Pengembalian Belanja	-	(41.943.500)	-
Jumlah Belanja	14.832.600.164	14.495.042.690	2,33

*Belanja Modal
Rp.1.743.114.812.*

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja Modal Politeknik Negeri Ketapang 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.743.114.812. dan 31 Desember 2020 Rp.1.199.656.000. terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun ini Politeknik Negeri Ketapang menerima anggaran dana belanja modal berupa Program Sarjana Terapan Berbasis Industri (PSTBI). Dana tersebut masuk DIPA revisi ke-02 Tanggal 13 Oktober 2021 adapun anggaran tersebut sebesar Rp.1.566.981.000. untuk 2 Prodi yakni Agro Industri dan Teknik Informatika. dalam Realisasi mengenai belanja Modal di Politeknik Negeri Ketapang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perbandingan Belanja Modal 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Peralatan dan Mesin	1.743.114.812	1.199.656.000	-
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		
Belanja modal lainnya	0	0	
	0	0	
Jumlah Belanja	1.743.114.812	1.199.656.000	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0.*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0. merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP terdiri dari UP RM sebesar Rp.150.000.000., UP PNBPN sebesar Rp.10.000.000. sementara tidak ada perbandingan dengan 31 Desember tahun sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran sudah Rp.0.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0.*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0. merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari dana Pendidikan yang belum disetor ke Kas negara dan masih berada pada Saldo rekening Bendahara Penerimaan. sementara tidak ada perbandingan dengan 31 Desember tahun sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya Posisi Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0.

C.3 Kas Lainnya dan setara kas

*Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp.1.636.505.*

Kas Lainnya dan setara kas merupakan kas lainnya yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran secara sah. Saldo Kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.636.505. tidak ada perbandingan dengan 31 Desember tahun sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya Posisi Kas lainnya dan setara kas Rp.0. kas lainnya berasal dari dana pihak ketiga yang berada pada rekening RPL per 31 Desember 2021 berupa dana LTMPPT dari Universitas Airlangga, karena tidak adanya konfirmasi dari pihak ketiga dana tersebut belum diberikan kepada yang bersangkutan per 31 Desember 2021.

C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan Yang Masih
Harus Diterima
Rp.34.500.000.*

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.34.500.000. tidak ada perbandingan dengan 31 Desember tahun sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya belum mengetahui/memahami dikarenakan kurangnya literasi penyusun laporan keuangan secara pribadi terhadap pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima bulan Desember 2021 berasal dari jasa pendidikan yang belum dilunasi oleh pengguna

penerima jasa pendidikan sementara sedang/sudah menikmati pendidikan tersebut.

*Piutang Bukan Pajak
Rp.4.000.000.*

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.4.000.000. dan jika disandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.29.300.000. adapun Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum di selesaikan pembayarannya melebihi semester (6 bulan) pendidikan yang ditempuh bersangkutan. Untuk saat ini piutang PNBPN Politeknik Negeri Ketapang hanya bersumber dari Piutang pendidikan. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNBPN	4.000.000	29.300.000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	4.000.000	29.300.000

*Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Piutang Bukan
Pajak
Rp.(20.000).*

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(20.000) jika disandingkan dengan nilai penyisihan piutang 31 Desember 2020 sebesar Rp(146.500). Penyisihan piutang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	4.000.000	0,50%	20.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	4.000.000		20.000
Jumlah	4.000.000		20.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4.000.000		20.000

Persediaan
Rp.30.840.925,-

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan Politeknik Negeri Ketapang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30.840.925,-. Dan 31 Desember 2020 Rp 52.413.042. terdapat penurunan sebesar 41,16 Persen dibanding periode sebelumnya. hal ini dikarenakan periode Desember tahun ini banyak kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan sehingga jumlah pemakaian persediaan pada akhir periode begitu tinggi dan hanya tersisa sedikit dibanding tahun sebelumnya.

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	27.139.950	48.300.042
Barang untuk Pemeliharaan	88.000	3.937.000
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	3.612.975	176.000
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	30.840.925	52.413.042

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.8 Tanah

Tanah
Rp.36.494.874.000,-

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 36.494.874.000. nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	36.494.874.000
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	-
Transfer Masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	36.494.874.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	36.494.874.000

Mutasi transaksi penambahan Tanah berupa:

Tidak ada mutasi tambah, baik berupa pembelian ataupun hibah. Khusus aset tanah tidak ada penyusutan.

Rincian asset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 Rp 64.720.567.111,-. Nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	62.563.829.410
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	49.723.500
Pembelian	1.942.014.201
Transfer Masuk	165.000.000
Reklasifikasi Masuk	26.050.000
Perolehan Hasil Tindak lanjut Normalisasi	136.474.111
Total Mutasi Tambah	2.319.261.812
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(26.050.000)
Transaksi Normalisasi BMN	(136.474.111)
Total Mutasi Kurang	(162.524.111)
Saldo per 31 Desember 2021	64.720.567.111
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(56.623.543.185)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	8.097.023.926

Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan Mesin berupa:

- Saldo Awal sebesar Rp.49.723.500. berasal dari aset yang belum dicatat pada tahun 2020 oleh petugas SIMAK BMN. Sehingga tercatat di tahun 2021, hal ini juga disebabkan oleh akun pembentuknya berasal dari akun 52 sehingga tidak terdeteksi sebagai peralatan dan mesin belum diregister di SAIBA pada periode saat itu. Ada 3 SP2D pertama No.2009413001000642 tgl.02 Oktober 2020 Rp.2.899.000,-, kedua 2009413001000540 tgl.02 September 2020 Rp.2.564.500,-, dan ketiga 2009413001000293 tgl.17 Juni 2020 Rp.44.260.000,-
- Pembelian Sebesar Rp 1.942.014.201,- sebanyak 293 buah terdiri dari 14 SPM Belanja Modal (532111) sebanyak 218 buah sebesar Rp 1.681.661.202,- , terdapat Belanja Pemeliharaan akun (523121) 6 sebanyak SPM, Pembelian 17 buah sebesar Rp 111.485.579,- , akun (523133) sebanyak 1 SPM, Pembelian 6 buah dan sebesar Rp 40.493.420,- , akun (521219) sebanyak 4 SPM, Pembelian 12 buah, sebesar Rp 58.390.000,- dari transaksi penggunaan akun tersebut harus dilakukan jurnal penyesuaian, dan akun (521841) sebanyak 1 SPM, Pembelian 40 buah, sebesar Rp 49.984.000,- kesalahan

penggunaan akun tersebut harus di lakukan jurnal umum.

- c. Transfer Masuk sebesar Rp.165.000.000,- berasal dari hibah berupa alat Komunikasi (*Video Conference*) berdasarkan BAST dari Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Politeknik Negeri Ketapang No:308/E1/KU/2021, dan No:34/PL39/BA/SP/2021 Tanggal 22 Maret 2021.
- d. Reklasifikasi Masuk/Keluar sebesar Rp 26.050.000,- dengan nomor 1569/PL39/SK/SP/202 Tanggal 5 Nopember 2021, di karenakan kesalahan kode barang.
- c. Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2022 Tanggal 25 Januari 2022 tentang rilis aplikasi SAIBA versi 21.1.0 dan SIMAK BMN versi 21.1.0 dalam rangka Penyusunan LKKL *Unaudited* Tahun 2021. Dari hasil upload Kertas Kerja Konfirmasi (K3) terdapat data BMN Data Wajar Tidak Sama pada Politeknik Negeri Ketapang yang akan ditindaklanjuti dengan input Normalisasi Data BMN dengan surat nomor 2123/PL39/SK/KU/2021 Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 136.474.111,-.

Rincian asset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 109.225.288.211,-. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Gedung dan Bangunan
Rp.109.225.288.211,-*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	24.454.837.950
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	43.437.110.000
Penerimaan Aset Renovasi	38.224.428.440
Pengembangan Melalui KDP	3.108.911.821
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	23.595.397.464
Total Mutasi Tambah	108.365.847.725
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(23.595.397.464)
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	109.225.288.211
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(3.229.136.583)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	105.996.151.628

Mutasi tambah/kurang Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Gedung dan Bangunan pada Laporan Keuangan Per 1 Januari 2021 sebesar Rp 24.454.837.950,- sebanyak 11 unit.
- b. Telah dilakukan serah terima penyelesaian Pembangunan Gedung KDP menjadi Aset Definitif sebesar Rp 43.437.110.000,- sebanyak 2 unit yaitu:
 1. Gedung Kuliah T. Sipil, T. Industri dan Agroindustri dengan NUP 2
 2. Laboratorium T. Sipil, T. Industri dan Agroindustri dengan NUP 5
- c. Terdapat BAST Pengalihan Pencatatan Aset Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Berupa Aset Tetap Dalam Renovasi Nomor $\frac{56/BAST/Cb21/2021}{112/PL39/BA./SP/2021}$ Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp 38.224.428.440,- dengan penarikan data melalui Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi pada NUP 2.
- d. Pengembangan Melalui KDP merupakan Perencanaan sebesar Rp 1.220.480.000,-, Manajemen Kontruksi sebesar Rp 1.574.700.000,- dan Honor ULP sebesar Rp 313.731.821,- pada Gedung Kuliah T. Sipil, T. Industri dan Agroindustri dan Laboratorium T. Sipil, T. Industri dan Agroindustri.
- e. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas pada aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 23.595.397.464,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Nilai Sebelum di Koreksi (Rp)	Nilai Setelah di Koreksi (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4010110001	2	58.706.344.078	35.110.946.614	Gedung Kuliah II (Teknik Sipil, Teknik Industri, Agroindustri)
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	4010105001	5	26.064.106.183	49.659.503.647	Laboratorium II (Teknik Sipil, Teknik Industri, Agroindustri)
Jumlah				84.770.450.261	84.770.450.261	

Rincian asset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.2.792.426.790,-

C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp.2.792.426.790. nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.792.426.790
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Pembelian	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	2.792.426.790
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.392.439.582)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.399.987.208

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp.2.536.763.860,-

C.12 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.536.763.860. nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.536.763.860
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Pembelian	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	2.536.763.860
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.536.763.860

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang. Aset tetap lainnya adalah aset yang terdiri dari koleksi perpustakaan (Buku dan Non Buku)

Rincian aset tetap lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp.6.407.520.000,-

Rp.6.407.520.000. dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	52.953.541.821
Mutasi tambah:	
Saldo Awal Tahun 2016	
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	43.437.110.000
Pengembangan Melalui KDP	3.108.911.821
Koreksi Nilai KDP	-
Total Mutasi Kurang	46.546.021.821
Saldo per 31 Desember 2021	6.407.520.000

Rincian asset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. KDP Politeknik Negeri Ketapang berasal dari gedung Lab dan kuliah terpadu tahun 2015 dan sudah selesai dibangun pada Bulan September 2020. Telah dilakukan serah terima penyelesaian Pembangunan Gedung KDP menjadi Aset Definitif sebesar Rp 43.437.110.000,- sebanyak 2 unit yaitu: Gedung Kuliah T. Sipil, T. Industri dan Agroindustri dengan NUP 2 dan Laboratorium T. Sipil, T. Industri dan Agroindustri dengan NUP 5 berdasarkan dengan BAST Pengalihan Pencatatan Aset Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Berupa Aset Tetap Dalam Renovasi Nomor $\frac{56/BAST/Cb21/2021}{112/PL39/BA./SP/2021}$ kepada Politeknik Negeri Ketapang Tanggal 26 Oktober 2021, dan terdapat Pengembangan Melalui KDP yang merupakan Perencanaan sebesar Rp 1.220.480.000,-, Manajemen Kontruksi sebesar Rp 1.574.700.000,- dan Honor ULP sebesar Rp 313.731.821,- pada Gedung Kuliah T. Sipil, T. Industri dan Agroindustri dan Laboratorium T. Sipil, T. Industri dan Agroindustri.

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan
Aset
Tetap Rp.(61.245.119.350),-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp.(61.245.119.350,-) dan saldo akumulasi penyusutan aset tetap 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.(55.811.771.315). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap. Terkecuali untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	64.720.567.111	56.623.543.185	8.097.023.926
2	Gedung dan Bangunan	109.225.288.211	3.229.136.583	105.996.151.628
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.792.426.790	1.392.439.582	1.399.987.208
Akumulasi Penyusutan		176.738.282.112	61.245.119.350	115.493.162.762

C.15. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp.1.418.009.174*

Saldo Aset tak berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.418.009.174. dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1.418.009.174
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Pembelian	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	1.418.009.174
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.418.009.174)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang. Aset tak berwujud adalah aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi memiliki manfaat ekonomi. Seperti halnya Software.

Rincian aset tak berwujud disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.66.819.789.*

C.16 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp.66.819.789. dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp.120.138.020. terdapat penurunan pada periode ini. hal ini dikarenakan pada periode sebelumnya ada beban belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa tunjangan kinerja bulan desember. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: pertama belanja Barang yang masih harus dibayar per 31Desember 2021 adalah sebesar Rp.65.183.284,- dan Ketiga dana pihak ketiga berupa dana LTMPPT dari UNAIR yang belum disalurkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.636.505,-.

Rincian Utang kepada pihak ketiga disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp.893.316.667.*

C.17 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum sepenuhnya menjadi hak negara karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Seperti halnya di Politeknik Negeri Ketapang ialah Dana Pendidikan (PNBP) yang sudah diterima dari mahasiswa pada saat registrasi UKT, Politeknik Negeri Ketapang masih berkewajiban memberikan hak kepada mahasiswa berupa jasa pendidikan. Adapun pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.893.316.667,- dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.410.116.666. pendapatan diterima dimuka diperoleh dari dana PNBP semester Ganjil (September-Februari) sebesar Rp.2.679.950.000,-. Karena laporan ini disusun per 31 Desember 2021, sehingga masih menyisakan 2 bulan yang menjadi pendapatan diterima dimuka.

*Uang Muka dari KPPN
Rp.0.*

C.18. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0. dan 31 Desember 2020 Rp.0..Uang Muka dari KPPN terdiri dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.150.000.000 UP RM dan Rp.10.000.000. UP PNBP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan sudah dilakukan Gu nihil dan sisanya sudah di setor ke Kas Negara. Adapun sisa tersebut disetor pada tanggal 30 Desember 2021 dengan nomor NTPN:82BF36U8E387339T. Untuk UP Rm sebesar Rp.1.714.615,- dan nomor NTPN:DF5CB3CIEOULESDF pada tanggal 30 Desember 2021 dengan nilai setoran Rp.187.000,- merupakan sisa UP PNBP.Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp.0.*

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0. dan 31 Desember 2020 Rp.0.Utang jangka pendek lainnya berasal dari utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor per 31 Desember 2021. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran secara sah. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah akun pasangan dari Kas lainnya dan setara kas yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
Rp.160.043.141.596.*

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.160.043.141.596.

sementara ditahun sebelumnya nilai ekuitas per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.125.535.814.372. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan Penting Lainnya
Neraca

C.21 Catatan Penting Lainnya Neraca

Saldo Nilai Neraca Politeknik Negeri Ketapang sampai dengan 31 Desember 2021 sudah lengkap dan termasuk aset tetap. Khusus untuk periode ini dan seterusnya terdapat penambahan pendapatan yang masih harus diterima, yang tidak ada pada pelaporan periode sebelumnya dikarenakan minim literasi dari diri pribadi petugas penyusun laporan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp.4.713.123.116.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.4.713.123.116. dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.4.517.291.565. terdapat kenaikan 4.3 persen dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan pada tahun ini ada peningkatan dari segi peminat yang ingin kuliah di Politeknik Negeri Ketapang. Kemudian ditambah lagi dengan dibukanya kelas kerja sama untuk pegawai Pemda Kabupaten Ketapang. Adapun rincian pendapatan PNPB adalah sebagai berikut::

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	(TURUN) %
Pendapatan Pendidikan	4.615.002.999	4.422.083.334	-
Pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan	92.200.000	92.848.000	
Pendapatan pendidikan lainnya	-	2.360.000	
Pendapatan dari anggaran lain2	5.920.117	231	
Jumlah	4.713.123.116	4.517.291.565	4,34

Pendapatan Pendidikan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pembayaran registrasi mahasiswa. Sementara pendapatan ujian/seleksi masuk merupakan pendapatan dari penerimaan mahasiswa baru. Pendapatan anggaran lain-lain adalah pendapatan umum yang (bisa) ada di semua kementerian/lembaga. Terkait penjelasan selisih pendapatan LRA dan LO berbeda dilampirkan pada dokumen pendukung laporan keuangan ini.

Beban Pegawai
Rp.8.064.715.828.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.8.064.715.828. dan Rp. 2.713.410.866. adanya kenaikan 197 Persen dibanding periode sebelumnya. hal ini tidak terlepas karena adanya perubahan status pegawai yang awalnya CPNS menjadi PNS per tanggal 01 Januari 2021 sehingga hal ini berpengaruh pada belanja pegawai yang meningkat karena yang semula hanya menerima gaji 80 persen menjadi 100 persen untuk 30 orang pegawai. Kemudian pada tahun ini ada 7 orang yang telah lulus sertifikasi dosen sehingga mendapatkan tunjangan profesi dosen yang menggunakan akun belanja pegawai. Pada tahun ini ada beban belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja tahun 2020 yang dibayarkan/dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2021 dikarenakan tidak mencukupi pada periode sebelumnya. Hal ini tidak terlepas pada tanggal 16 Nopember 2020 terbit surat persetujuan Ijin Prinsip Penyamaan Besaran Tunjangan kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di tandatangani langsung oleh menteri keuangan Ibu Sri Mulyani dengan nomor: S-1055/MK.02/2020 dan kekurangan tersebut dimulai dari TMT 01 Januari 2020. Kemudian ditambah lagi dengan terbitnya SK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bulan juni untuk 55 orang pegawai, dengan tmt dimulai dari bulan february 2021 namun baru bisa dibayarkan rapelan gaji dan tukinnya pada bulan nopember mengingat revisi Dipa untuk penambahan baru selesai pada bulan tersebut. Sehingga mengakibatkan lonjakan presentase serapan. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Terkait beban pegawai di LO lebih besar dibanding dengan LRA dikarenakan LO menggunakan akrual basis sementara LRA kas basis. Nilai Beban pegawai di LO merupakan hasil dari jumlah **(beban pegawai + beban pegawai yang masih harus dibayar) – Beban pegawai tahun lalu yang dibayarkan menggunakan dipa tahun ini**. Adapun, rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Beban Pegawai 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban gaji pokok PNS	1.413.245.400	1.114.290.320	
Beban Pembulatan Gaji PNS	26.105	22.350	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	84.334.560	60.337.804	
Beban Tunjangan Anak PNS	19.966.354	13.887.106	
Beban Tunjangan Struktural PNS	-	40.225.000	
Beban Tunjangan Fungsional PNS	151.180.000	48.325.000	
Beban Tunjangan PPH PNS	1.883.102	617.800	
Beban Tunjangan Beras PNS	84.079.620	66.336.720	
Beban Uang Makan PNS	319.548.000	350.096.122	
Beban Tunjangan Umum PNS	56.095.000	85.120.000	
Beban Tunjangan Profesi Dosen	745.938.630	410.414.400	
Beban gaji pokok PPPK	2.053.853.100		
Beban Pembulatan Gaji PPPK	15.363		
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	134.519.750		
Beban Tunjangan Anak PPPK	47.497.830		
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	319.995.000		
Beban Tunjangan Beras PPPK	145.202.100		
Beban Uang Makan PPPK	413.522.000		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus)	531.739.622	523.738.244	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus) PPPK	1.542.074.292	0	-
Jumlah Belanja	8.064.715.828	2.713.410.866	197,22

*Beban Persediaan
Rp.626.691.420.*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.626.691.420. dan Rp.846.971.471. terdapat penurunan beban persediaan dibanding tahun sebelumnya. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-

barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan Politeknik Negeri Ketapang untuk per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	428.204.082	655.266.548	-
Beban Persediaan Bahan Baku	159.258.338	158.851.720	-
Beban Persediaan Pita Cukai dan Leges	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	39.229.000	32.853.203	-
Jumlah Beban Persediaan	626.691.420	846.971.471	-

*Beban Barang dan Jasa
Rp.11.434.459.881.*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.11.434.459.881. dan Rp.11.917.999.632. terdapat penurunan sebesar 26 persen dibanding dengan periode sebelumnya. Penurunan ini tidak terlepas karena berubah statusnya 55 orang pegawai PPNPN menjadi pegawai PPPK yang berimplikasi langsung pada beban gaji yang semula dari Beban belanja barang menjadi Beban Belanja Pegawai. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa Politeknik Negeri Ketapang untuk per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	656.012.978	576.829.227	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5.091.099.300	6.421.277.112	-
Beban bahan	315.911.050	355.689.100	-
Beban Honor Output Kegiatan	951.887.000	965.330.155	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.779.624.858	1.993.415.014	-
Beban Barang Pemberian Bantuan Op	0	87.500.000	-
Beban Barang Non Op (COVID)	0	75.675.000	-
Beban Langganan Listrik	317.861.722	176.914.378	-
Beban Langganan daya dan jasa lainnya	5.988.973	18.749.900	-
Beban Langganan Air	0	515.000	-
Beban Jasa Konsultan	149.792.000		-
Beban Sewa	21.881.000		-
Beban jasa Profesi	5.400.000	41.240.000	-
Beban Jasa Lainnya	91.745.000	105.388.750	-
Beban Aset Ekstrakomptabel	47.256.000	1.099.475.996	-
Jumlah	11.434.459.881	11.917.999.632	-4,06

Beban
Pemeliharaan
Rp.2.055.299.013

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.055.299.013. dan Rp.1.571.776.958. terdapat kenaikan sebesar 30,7 persen dari pada periode sebelumnya. Hal ini tidak terlepas karena banyak pemeliharaan berupa gedung dan bangunan pada tahun ini, seperti misalnya renovasi ruang auditorium direktorat, kemudian ada pembuatan lahan parkir pegawai dan mahasiswa dll. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan Politeknik Negeri Ketapang untuk per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	348.459.708	431.648.177	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lain	1.579.829.960	897.084.956	-
Beban Pemeliharaan Gedung/bangunan (covid)	0	36.287.000	
Beban Persediaan untuk pemeliharaan	38.226.700	46.616.650	
Beban Persediaan Suku Cadang	24.016.045	9.046.500	
Beban Pemeliharaan Lainnya	5.813.000	0	
Beban pemeliharaan Jaringan	58.953.600	151.093.675	
Jumlah	2.055.299.013	1.571.776.958	30,76

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.556.152.002.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.556.156.002. dan Rp.333.122.998. terdapat kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 66.9 persen, hal ini tidak terlepas dikarenakan pada tahun ini sudah melonggarnya tentang pembatasan bepergian keluar kota meskipun begitu tetap harus menggunakan Prokes yang ketat sebelum melakukan perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas Politeknik Negeri Ketapang untuk per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
belanja perjalanan biasa	506.795.305	326.622.998	
belanja perjalanan dinas dalam kota	49.356.697	6.500.000	
Jumlah	556.152.002	333.122.998	-66,9

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.5.306.328.168.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.306.328.168. dan Rp.2.213.863.824. terdapat kenaikan sebesar 139 persen dibandingkan periode sebelumnya. hal ini tidak terlepas karena pada tahun ini terjadi perubahan status KDP menjadi aset definitif Gedung dan Bangunan. Kemudian periode sebelumnya aset masih berada pada kode satker lama dibawah kemenristek belum dilakukan transfer keluar ke satker saat ini kala itu. Sehingga penyusutan dan amortisasinya masih dilakukan di kode satker lama. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Politeknik Negeri Ketapang untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.870.331.063	1.919.717.522	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.376.297.653	264.296.576	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	28.095.000	14.047.500	
Beban Penyusutan Jaringan	31.604.452	15.802.226	
Jumlah Penyusutan	5.306.328.168	2.213.863.824	(140)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.306.328.168	2.213.863.824	-

Beban Penyisihan Piutang tak tertagih Rp.(0)

D.8. Beban Penyisihan Piutang tak tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.146.500. pada tahun ini sesuai dengan edaran S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 mengharuskan beban penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo kredit dilakukan koreksi.

D.9. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp.0.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ialah Pendapatan selain pendapatan yang tidak termasuk kepada penggolongan pendapatan diatas. Pendapatan yang diluar dari kegiatan operasional dan tidak direncanakan atau masuk dalam estimasi pendapatan per 31 Desember tahun 2021. Pendapatan kegiatan non operasional untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.32.362.199. tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun ini nihil pendapatan non operasional. Rincian pendapatan non operasional lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan 2020

Uraian Pendapatan Non Operasional Lainnya	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	32.362.199	
Jumlah Beban Lain-lain	-	32.362.199	-

D.10. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp.0.*

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ialah beban selain beban yang tidak termasuk kepada penggolongan beban diatas. Beban yang muncul dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2021. beban untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp. 13.753.117. tidak ada perbandingan dengan tahun ini dikarenakan pada tahun ini nihil beban dari kegiatan non operasional. Rincian beban non operasional lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan 2020

Uraian Pendapatan Non Operasional Lainnya	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	13.753.117	
Jumlah Beban Lain-lain	-	13.753.117	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.125.535.814,37
2.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp.125.535.814.372 sementara 1 Januari Tahun 2020 adalah 0. Hal ini dikarenakan pada tahun lalu ekuitas awal masih berada di kode satker lama.

Defisit LO
Rp(23.323.571.428)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(23.323.571.428). dan Rp.(15.061.391.602) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang
menambah/mengur
angi Ekuitas
Rp.(44.149,867)

E.3 Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas sampai 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.(44.149.867) terdiri dari **(1)** koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset sebesar **Rp.(540.187)** yang disebabkan adanya transaksi reklasifikasi masuk dan keluar yang mengakibatkan perbedaan nilai akumulasi penyusutan terhadap peralatan dan mesin yang di klasifikasikan., **(2)** ditambah dengan koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp.(43.756.180) yang disebabkan dari Saldo Awal sebesar Rp.49.723.500. berasal dari aset yang belum dicatat pada tahun 2020 oleh petugas SIMAK BMN. Sehingga tercatat di tahun 2021, hal ini juga disebabkan oleh akun pembentuknya berasal dari akun 52 sehingga tidak terdeteksi sebagai peralatan dan mesin belum diregister di SAIBA pada periode saat itu. Ada 3 SP2D pertama No.2009413001000642 tgl.02 Oktober 2020 Rp.2.899.000,-, kedua 2009413001000540 tgl.02 September 2020 Rp.2.564.500,-, dan ketiga 2009413001000293 tgl.17 Juni 2020 Rp.44.260.000,- kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.(11.747.938). sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp.37.975.562. dan ditambah koreksi tindak lanjut normalisasi BMN sebesar Rp.(81.731.742) didapat lah nilai sebesar **Rp.(43.756.180)** dan **(3)** ditambah dengan nilai koreksi lainnya sebesar **Rp.146.500** yang disebabkan karena tidak diperbolehkannya lagi saldo penyisihan piutang dengan saldo negatif. Sehingga dilakukan penyesuaian beban penyisihan piutang yang bersaldo negatif ke akun koreksi lain-lain. hal ini diperkuat dengan surat S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 pada halaman 16.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.57.882.020.287.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas adalah transaksi yang menunjukkan hubungan dua entitas yang melakukan transaksi keuangan. Terdapat dua jenis transaksi antar entitas, yaitu: (1) ditagihkan ke entitas lain (DKEL) dan (2) diterima dari entitas lain (DDEL). Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.57.882.020.287. angka tersebut terdiri dari **(1)** DKEL sebesar Rp.24.712.714.964,- yang disebabkan dari pengeluaran kas dari BUN (KPPN Ketapang) dalam rangka mendanai belanja satker Politeknik Negeri Ketapang. **(2)** DDEL sebesar Rp.(5.187.123.117),- yang berasal dari penerimaan kas pada BUN (KPPN Ketapang) yang bersumber dari pendapatan / penerimaan pembiayaan Satker Politeknik Negeri Ketapang. Terlebih lagi satker Politap sebagai penyelenggara pendidikan sehingga sebagian besar DDEL nya berasal dari pendapatan pendidikan. **(3)** Transfer masuk adalah penerimaan dari entitas pelaporan lain, adapun transfer masuk Politap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.38.356.428.440,- berasal dari penerimaan aset Renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp.38.224.428.440, kemudian ditambah Transfer Masuk sebesar Rp.165.000.000,- berasal dari hibah berupa alat Komunikasi (*Video Conference*) berdasarkan BAST dari Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Politeknik Negeri Ketapang No:308/E1/KU/2021, dan No:34/PL39/BA/SP/2021 Tanggal 22 Maret 2021. Beserta terakhir akumulasi penyusutan sebesar Rp.(33.000.000).

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp.34.507.327.224.

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai penurunan ekuitas Politeknik Negeri Ketapang pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.34.507.327.224. dan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.125.535.814.372.

Ekuitas Akhir
Rp.160.043.141.596
6

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir Politeknik Negeri Ketapang pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.160.043.141.596. dan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.125.535.814.372.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG (042.01.677593)

Pada Tahun Anggaran 2021, Politeknik Negeri Ketapang mendapat DIPA dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan nomor SP DIPA-023.18.2.677593/2021 tanggal 23 Nopember 2020 dengan pagu sebesar Rp.18.146.375.000.

- a. Revisi pertama terjadi pada tanggal 26 Juli 2021 merupakan refocussing anggaran sebesar Rp.849.015.000
- b. Revisi kedua terjadi pada tanggal 13 Oktober 2021 merupakan penambahan anggaran menjadi Rp.24.931.835.000. adapun rincian penambahan tersebut diantaranya adalah: (1). Penambahan pagu gaji PPPK sebesar Rp.4.679.138.000. (2). Penambahan estimasi Pagu PNBPNP sebesar Rp.1.388.356.000. (3). Penambahan pagu untuk Program Sarjana Terapan Berbasis Industri (PSTBI) untuk 2 Prodi yakni masing-masing sebesar Rp.Rp.719.400.000 untuk Prodi Agro Industri dan Rp.847.541.000. untuk Prodi Teknik Informatika.
- c. Revisi ketiga terjadi pada 29 Nopember 2021 merupakan kegiatan revisi tanpa ada penambahan atau pengurangan Pagu anggaran, lebih kepada pemuktahiran data POK dan revisi halaman III Dipa.
- d. Revisi keempat terjadi pada 25 Desember 2021 hampir sama dengan revisi ketiga yakni merupakan kegiatan revisi tanpa ada penambahan atau pengurangan Pagu anggaran, hanya saja pada revisi terakhir ini lebih kepada pemuktahiran data POK.

F.2. PENGELOLA KEUANGAN

Pejabat perbendaharaan Politeknik Negeri Ketapang ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0224/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Januari 2020, Pejabat perbendaharaan yang ditetapkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk pejabat perbendaharaan lainnya yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai, Direktur telah menerbitkan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Direktur nomor: 15/PL39/KP/KU/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang pengelola keuangan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang TA 2021. Untuk

pejabatnya tidak jauh berbeda seperti tahun sebelumnya hanya pada jabatan PPK saja yang berganti semula Bapak Safi'ie menjadi Ibu Encik Eko Rifkowaty untuk TA 2021. Kemudian terjadi pergantian lagi pada bulan agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.702/PL39/KP/KU/2021 tanggal 30 Juli 2021 dalam surat tersebut terjadi perubahan untuk 3 jabatan yakni: Bendahara Penerimaan dari semula Bapak Hidayat menjadi Ibu Fiona Araminta Fabiola, Bendahara Pengeluaran dari Bapak Untoro Budi Harjanto menjadi Ibu Diani Dwi Oktavianti dan terakhir PPSM yang semula Bapak Temy Akhyar menjadi Bapak SY. Muhammad Zaki.

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. Politeknik Negeri Ketapang merupakan perguruan tinggi negeri baru yang belum memiliki pegawai yang kompeten dibidangnya sehingga pengelolaan keuangan dilakukan melalui peminjaman pegawai dari Pemerintah Daerah,
2. Politeknik Negeri Ketapang masih belum mampu melakukan pengoptimalan aset secara maksimal agar menjadi pendapatan bukan pajak.

F.4 JURNAL TIDAL LAZIM

Jurnal tidak lazim merupakan jurnal manual yang dilakukan pada aplikasi Saiba terkait aset yang di input dikarenakan banyak sebab. seperti kesalahan penggunaan akun dalam belanja yang membentuk aset atau kejadian yang tidak lazim lainnya. Adapun rincian Jurnal tidak lazim Politeknik Negeri Ketapang pada tahun 2021 di jelaskan pada tabel berikut:

No	Kode	Satuan Kerja	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
1	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	31/12/202	202112677593008	117911	7.821.000	0	Jurnal Umum untuk menyesuaikan Belanja Modal alat laboratorium dibawah kapitalisasi
2	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	30/11/202	202111677593096	132211	0	47.256.000	Jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan Belanja Modal dibawah kapitalisasi
3	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	30/04/202	202104677593002	132211	6.000.000	0	Jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan Belanja barang yang membentuk Aset peralatan dan mesin
4	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	31/05/202	202105677593003	132211	23.136.000	0	Jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan Belanja barang yang membentuk Aset peralatan dan mesin
5	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	31/03/202	202103677593005	117911	0	928.200	Jurnal Penyesuaian untuk belanja barang persediaan yang tidak menjadi persediaan
6	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	31/03/202	202103677593006	117911	0	51.000	Jurnal Penyesuaian untuk belanja barang persediaan yang tidak menjadi persediaan
7	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	31/08/202	202108677593043	132211	24.749.000	0	Jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan Belanja barang yang membentuk Aset peralatan dan mesin
8	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	30/09/202	202109677593044	117911	0	321.000	Jurnal Penyesuaian untuk belanja barang persediaan yang tidak menjadi persediaan
9	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	05/05/202	202105677593004	117911	0	4.235.000	Belanja yang muncul akibat menggunakan akun 5218 untuk belanja aset tetapi dibawah kapitalisasi

13	023.18.677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	31/12/202	202112677593007	132211	49.984.000	0	Belanja yang membentuk aset peralatan dan mesin yang menggunakan akun 521841
14	023.18.677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	30/09/202	202109677593002	132211	1.330.000	0	Belanja Yang membentuk aset peralatan dan mesin menggunakan akun 521219
15	023.18.677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	31/10/202	202110677593002	117911	3.929.475	0	Belanja yang membentuk aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang persediaan
16	023.18.677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	30/11/202	202111677593003	117911	2.447.135	0	Belanja yang membentuk aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang persediaan
17	023.18.677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	22/12/202	202112677593004	132211	28.000.000	0	Belanja Yang membentuk aset peralatan dan mesin menggunakan akun 521219
18	023.18.677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	27/12/202	202112677593005	132211	12.660.000	0	Belanja Yang membentuk aset peralatan dan mesin menggunakan akun 521219
19	023.18.677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	31/12/202	202112677593006	132211	16.400.000	0	Belanja Yang membentuk aset peralatan dan mesin menggunakan akun 521219
20	023.18.677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	31/12/202	202112677593007	117911	0	49.984.000	Belanja Yang membentuk aset peralatan dan mesin menggunakan akun 521841

21	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	31/12/202	202112677593008	132211	0	7.821.000	Belanja yang membentuk barang persediaan menggunakan akun belanja modal 532111
22	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	31/10/202	202110677593002	132211	0	3.929.475	Belanja yang membentuk aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang persediaan
23	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	408	30/11/202	202111677593003	132211	0	2.447.135	Belanja yang membentuk aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang persediaan
24	023.18.67 7593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	407	30/04/202	202104677593001	132211	2.850.000	0	Belanja Yang membentuk aset peralatan dan mesin menggunakan akun 523121